

***Gemeente* Semarang 1906 – 1942: Sebuah Riwayat Tata Kota Kolonial**

Heru Mulyanto^{1*}

¹ Universitas Indonesia; Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
Email: yarinda.bunnag@outlook.co.id

ABSTRAK

Sebelum menjadi Gemeente, kondisi sosial, ekonomi, tata kelola air, pasar, pelabuhan, dan pembangunan kota Semarang berada di bawah kontrol langsung dari pemerintah koloni dengan model yang sama seperti kota-kota di Eropa. Namun semenjak desentralisasi diterapkan, Semarang berubah secara cepat, menjadi kota dengan fasilitas yang memadai dan dengan infrastruktur yang berkesinambungan. Permasalahan yang dibahas dalam riset ini adalah bagaimana pemerintah Hindia-Belanda mengatur kota Semarang yang tadinya sangat Eropa-sentris, menjadi kota yang disesuaikan bagi penduduk pribumi. Urgensi / tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengungkap kronologi dan proses awal pengesahan Gemeente Semarang hingga pembangunan berbagai fasilitas publik di sebagian besar bidang, yaitu arsitektur kota, dinamika pelabuhan, eksistensi pasar, "kampongverbetering" (perbaikan kampung) dan dinamika Burgerlijke Openbare Werken di Kota Semarang dalam merekonstruksi kota ini dalam bentuk Gemeente. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah yang meliputi empat tahap: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi. Hasil yang didapat adalah bahwa dilakukan sebuah "verbetering" atau perbaikan terhadap kampung-kampung di kota Semarang. Sementara dari segi pelabuhan, Semarang pada masa sebelum desentralisasi telah dilakukan sebuah modernisasi oleh rezim Daendels. Dari segi arsitektur kota, sebelum dilakukan desentralisasi, model kota Semarang hampir sama dengan Batavia yang polanya berpusat pada keberadaan kanal dan sungai.

Kata kunci: Gemeente, Semarang, tata kota.

ABSTRACT

Before becoming a Gemeente, Semarang's social, economic, water management, market, harbor, and urban development were under the direct control of the colony government in the same model as European cities. However, since decentralization was implemented, Semarang has changed rapidly, becoming a city with adequate facilities and a sustainable infrastructure. The problem discussed in this research is how the Dutch East Indies government organized the city of Semarang, which was very European-centric, into a city adapted for the indigenous population. The urgency/objective of writing this article is to reveal the chronology and the initial process of the legalization of Semarang Gemeente until the construction of various public facilities in most fields, namely city architecture, port dynamics, market existence, "kampongverbetering" (village improvement) and the dynamics of Burgerlijke Openbare Werken in Semarang City in reconstructing this city in the form of a Gemeente. The method used is a qualitative descriptive method with a historical approach that includes four stages: Heuristics, Verification, Interpretation, Historiography. The results obtained are that a "verbetering" or improvement of the villages in the city of Semarang was carried out. In terms of the port, Semarang before decentralization was modernized by the Daendels regime. In terms of city architecture, before decentralization, the city model of Semarang was almost the same as Batavia, whose pattern was centered on the existence of canals and rivers.

Keywords: Gemeente, Semarang, urban planning

1. PENDAHULUAN

Studi tentang tata kota sebenarnya masuk dalam lingkup kajian ilmu geografi dan arsitektur. Namun, tak terbatas pada bidang ilmu tersebut bidang studi lain seperti ilmu sejarah juga mampu mengungkap tata kota suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Apabila kita mengamati sebuah kota sebagai suatu bentuk pemerintahan, maka pada hakekatnya, pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu [1]. Sebuah kota apabila ditinjau secara saksama, merupakan sebuah otoritas yang mengelola dirinya sendiri dibawah otoritas yang lebih besar lagi, yaitu provinsi, dan negara. Pemerintah negara Republik Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi kepada kota-kota di Indonesia sejak tahun 2000-an yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam kehidupan sebuah kota [1].

Maka dari itu, Kota Semarang yang dibahas dalam kajian ini merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya sendiri di Provinsi Jawa Tengah. Namun, perlu dipertanyakan, sejak kapankah kota Semarang memiliki otonomi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dirunut sejarah pemberian otonomi melalui kebijakan desentralisasi di Hindia-Belanda. Struktur pemerintahan kota-kota pada masa pendudukan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) ditempatkan pada struktur yang tersentralisasi melalui kekuasaan Gubernur Jenderal. Di bawah gubernur jenderal, terdapat Gubernur/Residen yang bertugas mengawasi sebagian wilayah. Seperti misalnya wilayah Pantai Timur Laut Jawa seperti Pekalongan, Semarang, Jepara, Juwana, Rembang, Demak, Kendal, dan Kaliwungu berada di bawah kekuasaan gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Kemudian dalam perkembangannya, jabatan gubernur Pantai Timur Laut Jawa dihapus dan Pulau Jawa dipecah menjadi 16 prefektur/karesidenan. Gresik berstatus menjadi *onderprefecteur* [2]. Setiap residen yang memimpin karesidenan bertanggungjawab dan menerapkan instruksi dari gubernur jenderal. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang ada pada zaman VOC sampai Hindia-Belanda adalah sistem pemerintahan terpusat.

Hingga pada 1892 dilakukan *onderzoek* (penelitian) tentang tata pemerintahan di Hindia-Belanda. Perdebatan di wilayah koloni pun timbul dengan mengatakan bahwa perlu adanya pemberian otonomi daerah di Hindia-Belanda demi melancarkan kepentingan pemerintah lokal. Fakta tersebut didukung dengan adanya ekonomi liberal, yaitu perubahan pengelolaan ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh pihak pusat, semenjak tahun 1870, berpindah ke tangan swasta. Semakin kompleksnya urusan yang bersifat lokal mendesak diadakannya desentralisasi bagi daerah-daerah di Hindia Belanda agar lebih mempermudah urusan dalam berbagai bidang [3]. Sementara di Negeri Belanda sendiri, muncul perdebatan bahwa desentralisasi tidak perlu diberikan kepada pemerintah lokal karena hal tersebut dapat memberikan rakyat lokal kekuatan hingga kemudian menimbulkan pemberontakan. Argumen bahwa tidak perlunya diberikan desentralisasi juga dilandasi anggapan bahwa koloni Belanda yang menduduki Indonesia kala itu suatu saat juga akan kembali ke negeri asalnya. Akhirnya, perdebatan tersebut ditutup dengan sidang *Raad van Indie* di negeri Belanda yang memutuskan untuk memberikan otonomi pada kota-kota di Hindia Belanda. Namun, pemberian otonomi tidak perlu dipukul rata. Sebaliknya, akan diberikan perlakuan yang berbeda pada kota-kota di Jawa dan Luar Jawa yang memiliki karakter yang berbeda [4].

Terdapat beberapa pustaka yang akan dirincikan dalam bagian ini yang berfungsi untuk menentukan kebaruan riset ini. *Pustaka pertama*, yaitu artikel jurnal karya Sutarto dengan judul *Tinjauan Aspek Tata Ruang Perkembangan Kawasan Tawang Mas Kota Semarang*. Artikel tersebut membahas mengenai Perubahan tata guna lahan menyebabkan kenaikan debit aliran dan sedimen pada sungai-sungai di kawasan Tawang Mas yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan dan banjir. Peneliti menggunakan metode survei geografis ke wilayah Tawang Mas dan mengamati perubahan geografis kawasan tawang mas sejak tahun 1980, 1995, 2000, hingga 2007 melalui arsip yayasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan dan Rencana Desain Tata Ruang Kota Semarang hingga 2007 [5]. Dengan demikian, Sutarto mendapatkan hasil bahwa Kota Semarang sebelum tahun 1990 berkembang secara sektoral mengikuti jalur-jalur sungai sehingga menghasilkan permasalahan seperti masalah banjir, pembuangan air limbah dan sampah, penyediaan air bersih bersama pula dengan

peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Sementara dari 1990, 2000, hingga 2007, kota Semarang kawasan Tawang Mas dijadikan sebagai perkembangan tata ruang kota dan pemanfaatan lahan padat penduduk dan merupakan daerah strategis untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum maupun untuk perdagangan. keterbaruan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian, tahun 2007 hingga 2010, kawasan Tawang Mas, Semarang berfungsi sebagai pusat transportasi, permukiman dan perumahan, kawasan rekreasi, perdagangan dan jasa, perkantoran/pemerintahan [5]. Sutarto lebih berfokus pada perkembangan tata kota kawasan Tawang Mas, Semarang selama era kontemporer, namun tiak berfokus pada era kolonial.

Pustaka kedua, yaitu sebuah skripsi berjudul ‘*Kampongverbetering*’ dan *Perubahan Sosial Masyarakat ‘Gemeente’ Semarang Tahun 1906-1942* karya Amalia. Tulisan Amalia tersebut berfokus untuk membahas bagaimana pelaksanaan renovasi kampung atau *kampongverbetering* sebagai solusi masalah sosial di *Gemeente* Semarang pada waktu itu. Buruknya fasilitas dan kondisi kesehatan, perkampungan kumuh, dan kepadatan penduduk juga menjadi pokok bahasan dalam skripsinya tersebut [6]. Skripsi Amalia tersebut berfokus pada salah satu program kerja *Burgerlijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum) Hindia-Belanda dalam pembangunan *Gemeente* Semarang. Pelaksanaan *kampongverbetering* dihubungkan dengan perubahan sosial masyarakat *Gemeente* Semarang pada era 1906 – 1942, namun tidak memperhatikan faktor pemicu perubahan sosial lainnya seperti kriminalitas, pasar, dan lainnya.

Pustaka ketiga, yaitu buku berjudul *Kota Pelabuhan Semarang dalam Kuasa Kolonial: Implikasi Sosial Budaya Kebijakan Maritim, Tahun 1800 – 1940-an* karya Nurharjarini dkk [7]. Buku tersebut mengeksplanasikan bagaimana perkembangan pelabuhan di pantai utara Semarang di era kolonial, terutama pada abad ke-19 hingga 20. Dijelaskan dalam literatur ini bahwa aktor utama dibalik modernisasi pelabuhan adalah Herman Willem Daendels yang mulai merevitalisasi pelabuhan Tanjung Mas Semarang antara tahun 1808 – 1809. Daendels mulai merevitalisasi jalan akses pelabuhan dan kanal-kanal yang menuju pelabuhan Tanjung Mas demi kelancaran proses bongkar muat barang. Sejak pembangunan tahun 1870, pelabuhan Semarang menjadi pelabuhan aktif. Sejak diberlakukannya status *Gemeente* pada kota Semarang, pelabuhan Semarang memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil yang berfungsi sebagai pelabuhan penunjang. Pada akhirnya, di tahun 1920-an pelabuhan Semarang didesain layaknya pelabuhan di Genoa, Batavia, dan Padang yang dapat digunakan kapal-kapal Belanda yang telah teregistrasi untuk berlabuh.

Nurharjarini, dkk juga menjelaskan bahwa tata kota pelabuhan tersebut berpengaruh pada kondisi sosial dengan beragamnya penduduk Semarang yang datang melalui pelabuhan. Dampak Ekonomi dari majunya tata kota pelabuhan adalah dengan masuknya perusahaan *Nederlandsche-Handel Maatschapij* yang memberangkatkan kapal-kapalnya ke luar negeri dari pelabuhan Semarang sehingga perekonomian Semarang dapat terdongkrak [7]. Namun, buku ini tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai dampak ekonomi yang besar dari modernisasi pelabuhan Semarang. Hanya dijelaskan bahwa majunya pelabuhan Semarang menyebabkan perubahan kondisi sosial-budaya dengan banyaknya etnis yang masuk ke Semarang melalui pelabuhan.

Pustaka terakhir yang ditinjau dalam riset ini adalah buku berjudul *Sejarah Sosial Kota Semarang 1900 – 1950* [8]. Buku ini mendeskripsikan segi geografis wilayah Semarang dan juga dinamika demografi kota Semarang. Selain itu, tata fisik kota Semarang juga dijelaskan disini. Namun, sejarah tata kota Semarang hanya dijelaskan secara singkat dan padat disini sesuai sub-sub daerah kota Semarang. Misalnya, kota pusat kabupaten yang dideskripsikan memiliki pemukiman padat dan bangunan-bangunan seperti masjid besar, alun-alun, Pasar Johar, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi sejak 1690-an. Adapula penjelasan mengenai kota benteng di Semarang yang bernama *De Vijfhoek* yang didirikan pada tahun 1646. Sementara zona kampung Cina juga dideskripsikan dengan wilayah yang berkembang sejak 1741 – 1742 karena populasi orang Tionghoa yang dilimpahkan ke daerah Pekojan, Semarang. Tata kota dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik pada era tertentu, terutama era *Gemeente* Semarang.

Maka dari itu, dari pustaka-pustaka diatas yang masing-masing memiliki kerumpangan, seperti tidak memperhatikan faktor perubahan sosial, terlalu kontemporer, tidak menjelaskan dampak ekonomi dari modernisasi pelabuhan *Gemeente* Semarang, dan tidak spesifiknya penjelasan tentang tata kota *Gemeente* Semarang, maka penelitian ini akan melengkapi kerumpangan-kerumpangan dari pustaka-pustaka diatas dengan membahas kondisi *Gemeente* Semarang dari seluruh aspek yaitu, awal

pendirian, arsitektur kota, dinamika pelabuhan, eksistensi pasar dan kaitannya dengan kriminalitas, kondisi kampung-kampung, dan dinamika *Burgerlijke Openbare Werken* di era *Gemeente Semarang*.

2. METODOLOGI

2.1 Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dalam sudut pandang sejarah, yaitu arsip dan dokumen-dokumen kolonial. Arsip-arsip yang digunakan dalam riset ini yaitu:

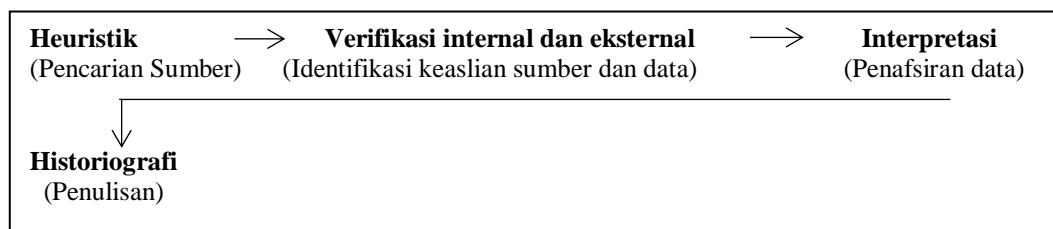
1. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1918 No. 482
2. *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1906 No. 120
3. *Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsche-Indie over het Jaar 1909*
4. *Verzameling van Decentralisatie Bepalingen, Tweede Druk: bij gewerkt tot 15 April 1908.*
5. *Onstaan der Groei der Stads- en LandGemeenten in Nederlandsch-Indie.*

Data-data tersebut diperoleh secara online dari website seperti *Delpher* [24], *Internet Archive* [25], dan “Digital Collection” dari Universitas Leiden [26]. Sumber-sumber digital dipilih disini karena melimpahnya jumlah dan kemudahan akses arsip digital, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengumpulan data. Selain sumber-sumber primer, sumber-sumber sekunder seperti pustaka-pustaka terdahulu juga digunakan disini sebagai pembandingan dan pelengkap dari sumber-sumber primer yang telah ada.

2.2 Metode

Metode yang digunakan adalah metode sejarah, dimana Metode Sejarah terdiri atas empat langkah yang berurutan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. *Pertama*, heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang bersifat primer dan sekunder. *Kedua*, kritik sumber yang dimana pada tahapan ini dilakukan kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan pada proses heuristik untuk memastikan otentisitas dan kredibilitas sumber yang sudah terkumpul. Setelah pengumpulan sumber, dilakukan pengujian sumber melalui kritik intern. *Ketiga*, interpretasi, yaitu kegiatan menghubungkan antara fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis dan sebab-akibat dengan melakukan imajinasi, dan analisis. Tahap ini penting dilakukan karena fakta-fakta sejarah yang ditemukan masih tidak saling berhubungan, dan belum menunjukkan makna. *Keempat*, historiografi yaitu tahapan rekonstruksi atau penyusunan tulisan sejarah secara kronologis dan sistematis, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh pembacanya [9].

Sumber dalam artikel ini diperoleh dari beberapa Lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga Perpustakaan Universitas Leiden. Sumber lainnya juga didapatkan dari artikel-artikel jurnal yang banyak tersedia di Internet dan juga wawancara narasumber. Seluruh sumber dikumpulkan dari berbagai media untuk melengkapi sumber primer maupun sekunder yang sudah terkumpul. Skema alur pemikiran dan metode penelitian dapat dilihat pada diagram alur dibawah ini:



Gambar 1. Diagram alur penelitian

Sumber: penulis, 2024

2.3. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ini adalah teori *Urban Regime*. *The Urban Regime Theory* adalah suatu teori yang tidak menjelaskan perubahan rezim, namun analisis lintas kasus yang mengungkapkan pembentukan dan perubahan rezim berkaitan dengan pergeseran demografis, restrukturisasi ekonomi, kebijakan hibah federal dan mobilisasi politik, terutama dalam kasus koalisi progresif atau reformasi sosial [10]. Teori Urban Regime tercipta dari hasil studi kasus di

kota Atlanta, Amerika Serikat. Teori Urban Rezim yang membahas pengaruh suatu rezim perkotaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu kota berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas penulis dalam artikel ini. Rezim kota Semarang yang berbentuk *Gemeente* berpengaruh besar terhadap perubahan arsitektur kota Semarang, kondisi ekonomi Semarang sejak 1906 – 1942, hingga eksistensi pasar dan kriminalitas di dalamnya. Penulis berhipotesis bahwa perkembangan kota Semarang sebelum dan sesudah pembentukan *Gemeente* sangat ditentukan berdasarkan rezim yang berkuasa dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim tersebut. Inti dari rezim *Gemeente* adalah menekankan desentralisasi sehingga kota-kota di Jawa pada kurun waktu 1906 – 1942 dapat berkembang secara lebih independen dan tidak terikat. Dengan begitu, liberalisasi dalam segala aspek terjadi disini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Awal Pendirian *Gemeente* Semarang

Ide mengenai desentralisasi komando administrasi perkotaan mulai muncul bersama dengan munculnya ide *decentralisatiewet* 1903. Semelumnya, desentralisasi telah muncul sejak akhir tahun 1800-an karena berbagai isu-isu dan permasalahan terkait perkotaan di Batavia, *Meester Cornelis* (Jatinegara), dan *Ommelanden* (Bogor, Depok, Bekasi), serta di kota-kota lainnya seperti Semarang, Malang, dan Salatiga. Masalah-masalah terkait kependudukan dan sanitasi yang kurang memadai serta buruknya sistem administrasi terpusat di Hindia-Belanda kala itu menuntut pemikiran-pemikiran progresif dari aktivis desentralisasi seperti van Dedem dan J. Th. Creemer. Perbincangan mengenai desentralisasi sebenarnya telah mencapai fase rapat parlemen pada tahun 1902 berkat usulan Menteri Koloni, T.A.J. van Asch van Wijck, dan A.W.F. Idenburg. Rancangan undang-undang desentralisasi tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang *De Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederlandsch-Indie* tahun 1903, No. 219. Selain undang-undang, ada pula *Staatsblad* (lembaran negara) *Staatsblad voor Nederlandsch-Indie* No. 329 [2].

3.2. Arsitektur Kota Semarang Sebelum dan Sesudah *Gemeente*

Pada intinya, sebelum tahun 1900-an, pembangunan kota Semarang tidak benar-benar direncanakan secara baik. Sebaliknya, perkembangan arsitektur kota Semarang cenderung mengikuti perkembangan pemukiman penduduknya yang tumbuh secara improvisasi. Kota Semarang sebelum abad ke-20 adalah sebuah wilayah yang bertumbuh meluas secara tidak teratur dengan pusat yaitu Kota Lama dengan Benteng *Vijfhoek* sebagai pusatnya [12].

Pelaksanaan tata kota Semarang sebelum terbentuknya *Gemeente* tidaklah terstruktur. Namun, pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808 – 1811), dibangun Jalan Raya Pos yang dalam sudut pandang kota Semarang, bagian dari Jalan Raya Pos tersebut adalah Jalan *De Heerenstraat*, (Jalan Letjend. Suprpto sekarang) [13]. Kemudian Jalan *De Heerenstraat* tersebut mendorong adanya laju urbanisasi di kota Semarang seiring berjalannya waktu.

Mulai awal tahun 1820-an, perkembangan infrastruktur, khususnya jalan-jalan di kota Semarang mulai berkembang secara pesat semenjak munculnya pemukiman orang-orang Eropa di luar benteng *Vijfhoek*. Berdirinya pemukiman orang-orang Tionghoa membuat penataan jalan di kota Semarang juga turut ikut sidesuaikan. Di samping orang-orang Tionghoa, di luar Kota Benteng di sebelah timur Kali Semarang juga bermukim orang-orang Sulawesi dan Bali, sedangkan orang-orang Jawa dan Melayu tinggal di sebelah barat Sungai Semarang [13]. Pemukiman-pemukiman yang banyak bermunculan tersebut mempengaruhi perkembangan jalan ke barat dari arah benteng *Vijfhoek*, yaitu jalan berkembang arah Poncol yang akhirnya menghubungkan benteng dengan kampung di sebelah barat. Sementara Jalan Pengapon menghubungkan benteng dengan pemukiman di sebelah timur.

Setelah tahun 1824, yaitu seperempat abad setelah berakhirnya VOC, pemukiman Belanda mulai berkembang ke jalan Bojong, ke arah barat (jalan Daendels) dan di sepanjang jalan Mataram. Menjelang abad 20 kota lama semakin berkembang pesat dan banyak dibangun kantor perdagangan, bank, kantor asuransi, notaris, hotel, dan pertokoan [22]. Tiga dasawarsa setelah era Daendels, tepatnya tahun 1847, menurut Theo Stevens pemukiman orang-orang Tionghoa, Melayu, dan Arab sudah berkembang sangat *massive* hingga mencakup sepertiga wilayah kota Semarang [23]. Pada tahun 1866, terlihat terdapat kawasan Cina di sebelah barat Sungai Semarang. Kawasan Jalan

Mataram saat itu sudah berkembang dan Jalan Mataram dipenuhi rumah-rumah yang ditinggali oleh penduduk asli Jawa. Namun batas kota di sebelah Selatan masih berupa Sungai Semarang. Jalan-jalan baru di Timur bermunculan, seperti *Karreweg* (sekarang Jalan Dr.Cipto) sebagai jaringan yang sejajar dengan Jalan Mataram. Di antara dua jalan paralel itu muncul kampung-kampung kota. Ada juga pemakaman Belanda di sisi ini. 'Muara' (atau ujung) *Karreweg* berada di jalan menuju daerah Gubug di Tenggara Semarang. Di sebelah barat, kota ini masih berbatasan dengan *Poncolscheweg*, tempat munculnya kampung kota baru secara bertahap [12].

Sementara setelah sistem administrasi *Gemeente* diperkenalkan di Semarang pada 1906, hanya penduduk asli yang tetap berada di bawah pemerintahan pusat di Batavia (*Inlandsch bestuur*, atau 'Pemerintahan pedalaman', pemerintahan untuk 'Penduduk Asli'), yang diwakili oleh bupati pribumi di Semarang. Orang Belanda, Tionghoa, dan penduduk asing lainnya kini menjadi penduduk yang ditempatkan di bawah kewenangan otonom *Gemeente* kota. Perkembangan ekonomi yang terjadi di kawasan perkotaan sejak penghapusan *Cultuur Stelsel* menciptakan kawasan yang sangat padat penduduknya [12]. Setelah adanya bentuk pemerintahan *Gemeente*, pelan-pelan sistem pemerintahan desa diubah menjadi sistem distrik. Pada tahun 1918, dilaksanakan program *Woningtoezicht* (pengawasan rumah-rumah warga). *Woningtoezicht* dilakukan dengan membubarkan bentuk otoritas kecil seperti desa dan menggantinya dengan bentuk distrik-distrik yang mereka semua berada dibawah pengawasan dewan distrik kota. Dewan distrik kota langsung bertanggung jawab kepada *Gemeente*. Dengan demikian, pemerintah kota mempunyai sebuah badan yang memungkinkan adanya kontak yang diinginkan dengan penduduk. Kantor distrik (sebelumnya, kantor desa) dapat menjadi cabang dari balai kota, dimana kelahiran dan kematian dapat dilaporkan, dimana izin bangunan dan lainnya dapat diajukan, pengaduan dapat disampaikan [21].

Dapat diamati bahwa sebelum terciptanya sistem *Gemeente*, struktur keruangan kota Semarang hanya berkembang meluas secara spontanitas dan tidak teratur. Aktor yang berperan dalam perkembangan kota Semarang sebelum tahun 1906 adalah kampung kota. Kampung kota di sekitar benteng Vijfhoek meluas ke barat dan ke timur benteng. Kebanyakan kampung tersebut terdiri dari pemukiman-pemukiman Tionghoa Sulawesi, Bali, Jawa dan Melayu. Sedangkan perkembangan arsitektur tata kota di Semarang setelah berdirinya *Gemeente* mulai padat dan terjadi laju urbanisasi. Maka dari itu, dilakukan perubahan bentuk administrasi desa menjadi lebih terstruktur. Misalnya, dilakukan praktek sistem distrik (*Woningtoezicht*) yang dapat mengawasi tiap-tiap kepala keluarga.

3.3. Dinamika Pelabuhan Semarang Sebelum dan Sesudah *Gemeente*

Pembahasan kondisi kota Semarang sebelum era *Gemeente* bertolak dari masa kepemimpinan Daendels (1808 – 1811). Periode ini diutamakan untuk dibahas karena Masa Daendels adalah periode progresif dimana kota-kota di Indonesia (terutama yang dilewati Jalan Raya Pos) mengalami *trigger* untuk berkembang pesat. Pembangunan-pembangunan di masa *Republik Bataaf* juga cukup pesat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Daendels menghubungkan seluruh pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa dengan Jalan raya Pos karena hal tersebut dinilai dapat mengoptimalkan mobilisasi hasil laut dan logistik dari satu pelabuhan, ke pelabuhan lainnya. Daendels juga melakukan pembangunan kanal di Semarang untuk menunjang transportasi maritim dan kebutuhan pelabuhan [13].

Pelabuhan Semarang kemudian mengalami pembangunan tambahan untuk pertama kalinya pada 1854 yang kemudian dikenal dengan nama *De Nieuw Haven Kanaal*. Tujuan dari dibangunnya pelabuhan Semarang tersebut ialah untuk menggali kanal terusan demi mendekatkan pelabuhan dari Kalibaru ke pesisir. Sementara di dekat Muara Kalibaru juga didirikan *de Kleine Boom* atau pos pemeriksaan pelabuhan [13]. Pelabuhan Semarang juga sempat mengalami modernisasi pada tahun 1870-an dengan mengubah pelabuhan Semarang menjadi pelabuhan aktif. Pada tahun 1900-an, optimalisasi pelabuhan di Semarang dilakukan dengan meningkatkan fasilitas pelabuhan dengan memaksimalkan pelabuhan kecil yang baru dibangun [7].



Gambar 2. *Klein-Boom Kalibaroe* di Pelabuhan Semarang
(Sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:855713>)

Menurut Nurharjarini dkk, pembangunan pelabuhan kecil dimulai pada tahun 1910 dan sempat tertunda karena perang. Pembangunan pelabuhan tersebut kemudian selesai pada tahun 1920 [7]. Dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1918, Stasiun Djoernatan Centraal juga sempat dihubungkan dengan jalur kereta api ke pelabuhan Kali Baru. Kali Baru pada masa itu adalah pelabuhan terbesar Semarang. Jalur kereta SJS (*Samarang-Joana Stoomtram*) juga digunakan untuk memperlancar arus distribusi barang ke Pelabuhan Semarang. Jalur *Jurnatan-Kleine Bloom* (Pelabuhan) dan Jalur *Jurnatan-Semarang NIS* (Stasiun Kemijen) juga merupakan jalur lainnya yang dilewati oleh kereta api trem milik SJS ini [15].

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan pelabuhan Semarang telah dilakukan sejak sebelum adanya bentuk pemerintahan *Gemeente*. Secara teknis, pelabuhan Semarang merupakan infrastruktur utama perdagangan dan pengangkutan logistik, maka Daendels membangun pelabuhan Semarang sehingga berubah menjadi *de Nieuwhaven Kanaal*. Sedangkan ketika kota Semarang telah berbentuk *Gemeente*, pembangunan semakin massive dengan adanya *Burgerlijke Openbare Werken* dan integrasi dengan jalur trem SJS (*Samarang-Joana Stoomtram*) sebagai infrastruktur dukungan bagi mobilisasi logistik.

3.4. Eksistensi Pasar dan Kaitannya dengan Kriminalitas

Satu pasar terkenal yang sekaligus menjadi pusat kehidupan ekonomi kota Semarang sejak dahulu ialah Pasar Johar. Pasar Johar jika dikategorikan menurut jenis-jenis pasar, pasar ini masuk dalam kategori tertinggi atau pusat grosir dan tali simpul ekonomi kota Semarang. Menurut hierarkinya, pasar pada masa kolonial terbagi menjadi dua jenis. *Jenis pertama*, dinamakan pasar sentral atau pasar induk atau bisa juga disebut pasar besar, tempat berlangsungnya transaksi jual beli dalam skala besar (grosir, tempat para distributor/agen mendapatkan barang dagangan. *Jenis kedua* dinamakan pasar lokal atau pemerintah kolonial Belanda menyebutnya pasar domestik kecil, yang sebagian besar kegiatannya menangani perdagangan eceran dalam arti penjualan barang-barang keperluan hidup primer sehari-hari [16]. Sejak desentralisasi diterapkan di kota Semarang, pasar-pasar ikut terpengaruh kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pembentkan lembaga pasar oleh pemerintah kolonial dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk *Gemeente* Semarang yang terdiri dari berbagai etnis seperti Tioghoa, Arab, Jawa, dan pribumi lain. Lembaga pasar seperti pasar sentral dan pasar lokal dibentuk oleh pemerintah kolonial sebagai langkah dalam mengatur perekonomian rakyat menjadi lebih terstruktur. Terdapat pula pajak yang wajib dibayarkan dan juga retribusi sebagai ganti

dari fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kolonial seperti kios, uang lahan, sewa gudang, pengangkutan, dan lain sebagainya. Melalui pengelolaan yang demikian, dewan kota (*Gemeenteraad*) Semarang dapat mengawasi dan mengelola kehidupan ekonomi kerakyatan *Gemeente* Semarang. Dengan adanya struktur lembaga pasar yang berjenjang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pasar-pasar di *Gemeente* Semarang tidak dapat disebut sebagai pasar tradisional. Sebaliknya, istilah yang lebih cocok digunakan untuk menyebut pasar jenis ini menurut Wijayati, yaitu pasar *Gemeente* atau pasar kotapraja [16].

Sementara dalam kaitannya dengan kekerasan dan kriminalitas di *Gemeente* Semarang, pasar didefinisikan sebagai ruang publik yang rawan menjadi tempat praktek kekerasan dan kriminalitas. Terdapat dua jenis ruang dalam bentuk pemerintahan *Gemeente*, yaitu ruang privat dan ruang publik. Ruang privat digambarkan sebagai tempat beraktivitas suatu golongan penduduk seperti kampung kota, kawasan real estate, dan kawasan pemukiman Tionghoa. Sedangkan ruang publik didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai macam golongan dari strata sosial yang berbeda. Contoh ruang publik ini misalnya pasar, stasiun, dan masjid. Menurut Wijayati, pasar merupakan tempat publik dengan probabilitas terjadinya kriminalitas paling banyak dibandingkan ruang-ruang publik lainnya. Wijayati menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pola kekerasan yang muncul di pasar, yaitu [17]:

1. Kekerasan antara warga dengan warga (dalam bentuk pencurian dan pencopetan)
2. Konflik antara pedagang dan pedagang (konflik horisontal antar pedagang)
3. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat koloni terhadap pedagang ataupun pelanggan pasar.

Pola kekerasan dan kriminalitas sebenarnya telah ada di pasar dan berlanjut hingga masa kini. Kekerasan tipe pertama (antara warga dengan warga) dan kekerasan tipe kedua (antara pedagang dengan pedagang) sebenarnya adalah masalah yang umum di pasar. Namun, jika kekerasan tersebut menyangkut pihak otoritas suatu tempat terhadap masyarakat tempat tersebut, hal tersebut telah menandakan kesewenang-wenangan otoritas terkait yang dalam hal ini adalah *Gemeente* Semarang. Memang ada sebuah regulasi yang tujuannya memperbaiki kesemrawutan administrasi pasar. contohnya penertiban warung-warung di Kintelan. Dalam rangka penertiban dari pasar dan warung ini, maka mulai tahun 1912 diadakan sistem administrasi pasar di pemerintahan Kota Semarang. Organisasi ini terdiri atas; seorang administrasi, seorang ajun administrasi, 9 orang *marktmeester*, dan 10 *kulpmaktmeester*, dan 21 *hulpmarktmeesters* [8]. Namun, penertiban tersebut disertai dengan kekerasan dan penggrebagan dan penyitaan paksa atas dagangan-dagangan warung-warung tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa semenjak sistem *Gemeente* diterapkan, hal ini menyebabkan pemerintah *Gemeente* berinisiasi untuk melembagakan pasar-pasar di *Gemeente* Semarang. Pelembagaan pasar-pasar ini memang dimaksudkan untuk mengatur dan mendiptakan ketertiban di kalangan pasar-pasar Semarang, Namun, praktek penertiban tersebut sering kali disertai dengan kekerasan terhadap pedagang-pedagang pasar dan warung di *Gemeente* Semarang.

3.5. Kondisi Kampung-kampung pasca didirikannya *Gemeente* Semarang

Kampung-kampung kota Semarang sebelum berdirinya pemerintahan *Gemeente* Semarang bertumbuh menyebar ke barat dan ke timur benteng *Vijfhoek* menyatukan kota lama Semarang menjadi sebuah kampung raksasa. Kampung tersebut memiliki sifat yang bertumbuh terus tanpa kendali dan akan selalu meluas ke berbagai penjuru. Akhirnya, pada 1918, diterbitkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 482 tahun 1918 tentang penghapusan kampung-kampung kota yang termasuk dalam batas *Gemeente* Semarang. Berikut pernyataan dari *staatsblad* tersebut:

Pasal tunggal:

*Kotamadya adat (kampung kota) yang seluruhnya atau sebagian termasuk dalam batas-batas suatu kota yang telah dibentuk dewan, sebagaimana dimaksud dalam alinea kedua Pasal 68b, dapat dilakukan gentrifikasi dengan catatan bahwa selama wilayah yang termasuk dalam batas-batas itu adalah bersangkutan. Atau bila perlu, ditarik dari berlakunya ketentuan-ketentuan alinea kedua pasal ini, peraturan pembubaran *Gemeente* adat (kampung kota) baik sebagian-ataupun seluruhnya dapat diterapkan selama hal tersebut diperlukan. [18]*



Gambar 3. Pola Kampung Kota di *Gemeente* Semarang
Sumber: <https://ubl.webattach.nl/>

Kemudian, sebuah laporan dari Komisi Semarang bertanggal 18 Oktober 1920 secara kuat mengusulkan bahwa kampung-kampung kota di *Gemeente* Semarang harus dihilangkan. Ini didasarkan pada perluasan batas-batas kota pada 1919 dan 1920 ke arah luar yang merupakan kawasan kampung kota. Akibatnya, kampung-kampung yang “termakan” batas-batas kota Semarang tersebut diusulkan untuk digentrifikasi. Usulan tersebut disampaikan atas pertimbangan bahwa kampung-kampung dalam batas *Gemeente* Semarang tersebut masih memiliki unsur desa.

Komisi Semarang merekomendasikan agar pelaksanaan gentrifikasi dilakukan pada tahun berikutnya, dan *Gemeenteraad* (dewan kota) mengeluarkan peraturan tertanggal 1 Januari 1921 yang memperbolehkan penghapusan kampung sesuai dengan perubahan pasal 71 *Regeringsreglement* tahun 1918. Komisi-komisi akan mengawasi gentrifikasi tersebut dan hal ini akan mencakup partisipasi penduduk asli. Setiap desa akan memiliki komisi yang terdiri dari perwakilan kota, pegawai negeri Eropa (*Binnenlands Bestuur*), dan desa terkait. Jika komisi ini berselisih paham, keputusan ada di tangan kepala daerah. Komisi lain akan bertanggung jawab secara keseluruhan atas peraturan mengenai gentrifikasi [19]. Namun akhirnya, penghapusan kampung atau gentrifikasi tidak pernah dilakukan.

Namun sebenarnya, disamping munculnya gagasan gentrifikasi, telah ada gagasan untuk melakukan *kampongverbetering* (perbaikan kampung). Gagasan ini muncul pada tahun 1907. Tetapi gagasan tersebut hanya berlalu begitu saja karena tidak adanya dana untuk melakukan *verbetering* terhadap kampung-kampung kota di Semarang. Setelah adanya gentrifikasi kampung, pemerintah menawarkan penggantian kepada Semarang atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan segera setelah gentrifikasi dan untuk tujuan ini akan dimasukkan ke dalam anggaran *Gemeente* untuk tahun 1918 sejumlah uang yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada kota tersebut. Perbaikan kampung direncanakan untuk dilakukan sejak 1924. Namun hingga 1927, perbaikan kampung berlangsung lambat karena dana dari pemerintah *Gemeente* tidak mencukupi. Kemudian, tahun 1929, perbaikan kembali dilakukan tanpa dukungan dari pemerintah meskipun ada alokasi yang dimasukkan ke dalam anggaran tahun 1929 oleh pemerintah. Pada akhir tahun 1929, Semarang telah mengembangkan empat puluh empat hektar dan mempunyai dua puluh enam hektar tambahan yang sedang dalam penyelesaian, beberapa di antaranya selesai pada tahun berikutnya. Penduduk menghargai upaya kota dan bekerja sama dengannya. Ketertiban dan kebersihan harus dikembalikan setelah puluhan tahun diabaikan dan kotor [19].

Inti dari bahasan di atas adalah bahwa terdapat dua rencana untuk mengatasi pertumbuhan kampung kota *Gemeente* Semarang yang tidak terkendali. Dua skema tersebut adalah rencana gentrifikasi dan rencana *kampongverbetering*. Dua skema tersebut muncul pada waktu yang kurang lebih bersamaan, Rencana gentrifikasi muncul sejak dikeluarkannya *Staatsblad van de Nederlandsch Indie* 1908 No. 482, sedangkan rencana *kampongverbetering* muncul pada tahun 1908 dan sempat terlibas wacana gentrifikasi, meskipun akhirnya tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya, *kampongverbetering* dilaksanakan sejak kurun waktu 1924-1929 oleh dana pemerintah *Gemeente* yang akhirnya dicairkan untuk *kampongverbetering*.

3.6. Dinamika *Burgerlijke Openbare Werken* dalam pembangunan *Gemeente* Semarang

Burgerlijke Openbare Werken merupakan badan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Hindia-Belanda seperti jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta api, dan penyediaan air minum. Kaitannya dengan pembangunan jalan di *Gemeente* Semarang, *Burgerlijke Openbare Werken* melakukan pemeliharaan normal jalan, kecuali Tjandiweg. Dibeli sebanyak 3580,50 M³ batu gunung dengan harga 3,40 *gulden*, yang diolah menjadi batu pecah dan pasir oleh dua alat penghancur batu *Gemeente* (digerakkan oleh lokomotif). Dari penumpukan batu pada saat pembelian, tambahan *gulden* dibayarkan sebesar 0,10 *gulden* per M³ batu pecah dan pasir diperoleh dari 15 M³ (kapasitas satu penghancur per hari). Biaya pembuatan 1 M³ batu pecah atau pasir berjumlah 0,42 *gulden* (tidak termasuk keausan mesin) [14].

Kemudian berkaitan dengan pembangunan kanal banjir timur Semarang, *Burgerlijke Openbare Werken* pada 1909 melakukan pemeliharaan normal yang terdiri dari pemeliharaan bangunan agar tetap dalam kondisi baik, serta perbaikan gorong-gorong di bawah pipa Semarang, cangkang saluran air Gayam (Gayamsari), dan lantai pembuangan bendungan Kedungmundu. Terkait kanal, upaya dilakukan untuk menjaga kedalaman saluran utama dengan menutup saluran sekunder dan, sejauh mungkin dengan sumber daya yang tersedia, dataran banjir dibersihkan dari vegetasi. Parit selebar 7 meter digali mulai dari jembatan jalan pos utama Semarang - Demak hingga jembatan jalur Semarang - Solo jalur *N.I.S. Maatschappij*. Biaya pemeliharaan normal sebesar *f* 1.697, sedangkan *f* 382 dikeluarkan untuk pengawasan, pengoperasian dan pengawasan [14].

Kaitannya dengan pekerjaan pembangunan rel kereta api, *Burgerlijke Openbare Werken* dalam arsip *Dienst der Staatspoor en Tramwegen Mededeelingen Administratieve Dienst*. No. 1, Indische Spoorweg-Politiek. Deel VIII (Januari 1916), pasal 17 dan 18, dilaporkan bahwa terdapat tindakan pelebaran jalur dan konstruksi jalur ganda pada Stasiun Djoernatan Centraal.

Pasal 17.

Ukuran lintasan akan menjadi 1.067 meter, tergantung pada pelebaran lintasan yang diperlukan di tikungan.

Pasal 18.

a. *Untuk konstruksi jalur dengan jalur tunggal atau jalur ganda ditentukan sebagai berikut:*

Jalur 1 akan dibangun dengan double track;

Jalur 2 dengan jalur tunggal;

Jalur 3 dengan jalur ganda dari Aloon-Aloon ke Bodjongpark dan dengan jalur tunggal dari sana ke Westerlandjirkanaal;

Jalur 4 jika memungkinkan dengan jalur ganda sepanjang Djoernatan dari jalan menuju Djomblang hingga Verlengde Kerkstraat dan sebaliknya dengan jalur tunggal; baris 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan single track.

b. *Penggandaan lintasan pada jalur lintasan tunggal dapat dilakukan dengan izin dari Dewan Kota.* [20]

Dapat disimpulkan bahwa badan *Burgerlijke Openbare Werken* sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur *Gemeente* Semarang sejak 1909. Dibuktikan dengan fakta bahwa dilakukan pemeliharaan normal dengan membeli sebanyak 3580,5 M³ batu alam untuk pemeliharaan jalan. Selain pemeliharaan jalan, BOW juga melakukan pemeliharaan kanal banjir timur *Gemeente* dengan perbaikan gorong-gorong dan saluran bawah di Kedungmundu dan Gayam. Adapula tindakan pelebaran jalur trem *Samarang-Joana Stoomtram* yang dilakukan pada tahun 1916.

4. SIMPULAN

Limitasi riset ini terletak pada periode dimulainya sistem *Gemeente* tahun 1906 hingga akhir masa pemerintahan Hindia-Belanda yang sekaligus menandai berakhirnya sistem *Gemeente* (tahun 1942). Pada intinya, desentralisasi dan pendirian *Gemeente* Semarang menelan biaya *f* 196.700 ditambah *f* 700 per tahun untuk berbagai macam keperluan. Pendirian tersebut berdasarkan *Staatsblad van de Nederlandsch Indie: Decentralisatie* tahun 1906, No. 120. Sebelum terciptanya sistem *Gemeente*, struktur keruangan kota Semarang hanya berkembang meluas secara spontanitas dan tidak teratur. Aktor yang berperan dalam perkembangan kota Semarang sebelum tahun 1906 adalah kampung kota. Kampung kota di sekitar benteng *Vijfhoek* meluas ke barat dan ke timur benteng. Kebanyakan kampung tersebut terdiri dari pemukiman-pemukiman Tionghoa, Sulawesi, Bali, Jawa dan Melayu. Sedangkan perkembangan arsitektur tata kota di Semarang setelah berdirinya *Gemeente* mulai padat dan terjadi laju urbanisasi. Maka dari itu, dilakukan perubahan bentuk administrasi desa menjadi lebih terstruktur. Misalnya, dilakukan praktek sistem distrik (*Woningtoezicht*) yang dapat mengawasi tiap-tiap kepala keluarga

Sementara dalam kaitannya dengan pembangunan pelabuhan di *Gemeente* Semarang, hal tersebut telah dilakukan sejak sebelum adanya bentuk pemerintahan *Gemeente*. Secara teknis, pelabuhan Semarang merupakan infrastruktur utama perdagangan dan pengangkutan logistik, maka Daendels membangun pelabuhan Semarang sehingga berubah menjadi *de Nieuwhaven Kanaal*. Sedangkan ketika kota Semarang telah berbentuk *Gemeente*, pembangunan semakin masif dengan adanya *Burgerlijke Openbare Werken* dan integrasi dengan jalur trem SJS (*Samarang-Joana Stoomtram*) sebagai infrastruktur dukungan bagi mobilisasi logistik.

Dari aspek pasar, semenjak sistem *Gemeente* diterapkan, sejak desentralisasi diterapkan di kota Semarang, pasar-pasar ikut terpengaruh kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pembentukan lembaga pasar oleh pemerintah kolonial dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk *Gemeente* Semarang yang terdiri dari berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, Jawa, dan pribumi lain. Dewan kota (*Gemeenteraad*) Semarang dapat mengawasi dan mengelola kehidupan ekonomi kerakyatan *Gemeente* Semarang dengan bentuk lembaga pasar berjenjang. Maka, status pasar di *Gemeente* Semarang berubah dari Pasar Tradisional ke bentuk Pasar *Gemeente*. Sementara dari segi kriminalitas dan kekerasan, ditemukan fakta bahwa paling banyak kekerasan dilakukan oleh aparatur pemerintah koloni terhadap pedagang maupun pembeli di pasar.

Kampung-kampung kota Semarang sebelum berdirinya pemerintahan *Gemeente* Semarang bertumbuh menyebar ke barat dan ke timur benteng *Vijfhoek* menyatukan kota lama Semarang menjadi sebuah kampung raksasa yang bertumbuh terus tanpa kendali. Akhirnya, pada 1918, diterbitkan *Staatsblad van de Nederlandsch Indie* 1908 No. 482 tentang penghapusan kampung-kampung kota bersamaan dengan munculnya wacana *kampongverbetering* pada 1907 yang sempat terlibas wacana gentrifikasi. Setelah adanya gentrifikasi kampung, pemerintah menawarkan penggantian kepada warga Semarang atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan segera setelah gentrifikasi. Akhirnya, *kampongverbetering* dilaksanakan sejak kurun waktu 1924-1929 oleh dana pemerintah *Gemeente* yang akhirnya dicairkan untuk *kampongverbetering*.

Terakhir, terkait lembaga *Burgerlijke Openbare Werken*. Kaitannya dengan pembangunan jalan di *Gemeente* Semarang, *Burgerlijke Openbare Werken* melakukan pemeliharaan normal jalan, kecuali Tjandiweg. Dibeli sebanyak 3580,50 M³ batu gunung dengan harga *f* 3,40, yang diolah menjadi batu pecah dan pasir oleh dua alat penghancur batu *Gemeente* (digerakkan oleh lokomotif). Kemudian berkaitan dengan pembangunan kanal banjir timur Semarang, *Burgerlijke Openbare Werken* pada 1909 melakukan pemeliharaan normal yang terdiri dari pemeliharaan bangunan agar tetap dalam kondisi baik, serta perbaikan gorong-gorong di bawah pipa Semarang. Kaitannya dengan pekerjaan pembangunan rel kereta api, *Burgerlijke Openbare Werken* dilaporkan bahwa melakukan tindakan pelebaran jalur dan konstruksi jalur ganda pada Stasiun *Djoernatan Centraal*. *Burgerlijke Openbare Werken* sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur *Gemeente* Semarang sejak 1909.

Penelitian ini pada dasarnya adalah studi pendahuluan pada *Gemeente* Semarang berdasarkan sumber pustaka berupa dokumen-dokumen kolonial dan pustaka penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada lingkup Kota Semarang ketika berbentuk *Gemeente*. Tinjauan mengenai Semarang

sebelum era *Gemeente* dalam penelitian ini masih dapat diperdalam lagi. Dengan demikian, terdapat peluang bagi penelitian berikutnya untuk mengkritisi Kota Semarang pada era sebelum era *Gemeente* dan setelah bubarnya *Gemeente*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Rahyunir Rauf. "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan". *Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* Vol. Iii Nomor 1 April, 2017.
- [2] Effendi Wahyono. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuurshervormingswet 1922". *Disertasi Universitas Indonesia*. 2009.
- [3] Teti Hestiliani. "Decentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903". *Istoria*, Vol. 15, No. 2. September 2019.
- [4] Purnawan Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.
- [5] Agung Sutarto. "Tinjauan Aspek Tata Ruang Perkembangan Kawasan Tawang Mas Kota Semarang". *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, Nomor 2 Volume 9 – Juli 2007.
- [6] Rizky Amalia. "Kampongverbetering' Dan Perubahan Sosial Masyarakat *Gemeente* Semarang Tahun 1906-1942". *Skripsi Universitas Negeri Semarang*. 2016.
- [7] Dwi Ratna Nurharjarini, Indra Fibiona, Dan Suwarno. *Kota Pelabuhan Semarang Dalam Kuasa Kolonial: Implikasi Sosial Budaya Kebijakan Maritim, Tahun 1800an-1940an*. Jakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2019.
- [8] Haryono Kasmadi Dan Wiyono. *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900 - 1950)*. Jakarta: Depdikbud. 1985.
- [9] Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Bentang. 1995.
- [10] Karen Mossberger Dan Gerry Stoker. "The Evolution Of Urban Regime Theory". *Urban Affairs Review* / July 2001.
- [11] *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* 1906, No. 120, "Decentralisatie".
- [12] Pratiwo. "The City Planning Of Semarang 1900-1970". *The 1st International Urban Conference*, Surabaya, 2004, Retrieved From [Http://Www.Indie-Indonesia.NI/Content/Documents/Papers-Urban%20history/Pratiwo.Pdf](http://www.Indie-Indonesia.NI/Content/Documents/Papers-Urban%20history/Pratiwo.Pdf)
- [13] Wasino, Et.Al. *Semarang Sebagai Simpul Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Dinamika Perekonomian Jawa Tengah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- [14] *Verlag Over De Burgerlijke Openbare Werken On Nederlandsche-Indie Over Het Jaar 1909*. Batavia: Landsdrukkerij, 1911.
- [15] *Rapport Der Commissie Tot Onderzoek Der Spoor-En Tramwegtoestanden In En Om Semarang, Ingesteld Bij Gouvernementsbesluit Van 26 October 1918 No. 68*.
- [16] Putri Agus Wijayati. "Eksistensi Pasar-Pasar Tradisional Di Kota Semarang Tahun 1873 – 1914". *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 36 No. 2 Desember 2009.
- [17] Putri Agus Wijayati. "Kekerasan Dan Kriminalitas Di Kota Semarang: Antara Negara Kolonial Dan Otoritas Lokal". *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 25 Nomor 3 November 2019.
- [18] *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* 1918, No. 482, "Regeerings-Reglement".
- [19] James L. Cobban. "Kampungs And Conflict In Colonial Semarang". *Journal Of Southeast Asian Studies*, Vol. 19, No. 2, Pp. 266-291. Sep, 1988.
- [20] *Dienst Der Staatspoor En Tramwegen Mededeelingen Administratieve Dienst*. No. 1, Indische Spoorweg-Politiek. Deel Viii (Januari 1916).
- [21] Schrieke, J.J. *Onstaan En Groei Der Stads-En Landgemeenten In Nederlandsche-Indie*. Amsterdam: H.H. De Bussy, 1918
- [22] L.M.F. Purwanto. "Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)". *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 33, No. 1: 27 – 33, Juli 2005.
- [23] Septiawan, Firmanda Dwi. "Sejarah Salah Satu Kota Kolonial Di Jawa Tengah, Semarang". *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2 (1), 7-12, 2022.
- [24] Delpher. ([Http://Delpher.NI](http://Delpher.NI))
- [25] Internet Archive ([Https://Archive.Org/](https://Archive.Org/))
- [26] Digital Collection Leiden University ([Https://Digitalcollections.UniversiteitLeiden.NI/](https://Digitalcollections.UniversiteitLeiden.NI/))